

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pembangunan

Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Sadono Sukirno, 1994;10).

Djojohadikusumo (1994), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Temenggung (1997) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto (PDB/PDRB) tanpa memperhatikan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah perubahan dalam struktur ekonomi (dan struktur masyarakat serta kelembagaan yang menyertainya) berlangsung atau tidak.

Indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya pertumbuhan

ekonomi suatu negara/daerah salah satunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sukimo, (2002) Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun.

Dernburg (1986) menjelaskan bahwa pengukuran PDB atau PDRB dapat dilakukan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan produksi

PDB atau PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam menghitung PDB atau PDRB dengan pendekatan produksi yang dihitung adalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan. Dengan cara ini dapat dihindarkan berlakunya perhitungan ganda.

2. Pendekatan pendapatan

PDB atau PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum di potong pajak langsung.

3. Pendekatan pengeluaran

PDB atau PDRB adalah semua komponen pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam bentuk Konsumsi (C), perusahaan dalam bentuk Investasi (I), Pemerintah (G), dan perdagangan luar negeri dalam bentuk Net Ekspor (X-M) biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

menurut (Todaro, 2000) trend pertumbuhan ekonomi yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima aliran pemikiran, yaitu: (1) model-model pertumbuhan bertahap-linier (linear-stages-of-growth-models), (2) teori dan pola-pola perubahan struktural (the structural change theories and patterns), (3) revolusi ketergantungan internasional (international dependence revolution), (4) kontra revolusi pasar bebas neoklasik (neoclassical free-market counterrevolution), dan (5) teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogen (new or endogenous theory of economic growth). Dalam kajian ini, hanya dikutip beberapa teori yang langsung terkait dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, sesuai dengan unit analisis dalam penelitian adalah tingkat propinsi, yakni Provinsi Lampung.

Pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi secara sistematis diawali oleh ajaran Adam Smith (1776, dalam Jhingan, 2000). Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah

seluruhnya termanfaatkan. Kalaupun ada pengangguran, hal itu bersifat sementara.

Menurut ajaran klasik, pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta membuat "aturan main" yang memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi (Jhingan, 2000).

Kewajiban pemerintah menurut ajaran Smith adalah menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Pengusaha perlu mendapat keuntungan yang memadai (tidak hanya sekadar keuntungan minimum) agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru.

Ajaran Smith dan ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, dan Mill meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol dan pemupukan modal akan terhenti (Jhingan, 2000).

Timbulnya keadaan stasioner (stationary state) seperti diramalkan Smith dan ahli ekonomi klasik lainnya, dibantah oleh Schumpeter (1961) dengan mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi. Unsur utama pembangunan menurut Schumpeter, terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk

inovasi yang akan membawa kepada pembangunan. Pappas dan Hirschey (1993) juga telah merinci beberapa teori yang menjelaskan mengapa keuntungan (laba bisnis) tidak menjadi nol. Diantara teori tersebut, adalah teori friksi, teori monopoli, teori inovasi, dan teori kompensasi. Jadi tetap ada kesempatan pembentukan modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Pandangan Smith (1776) dan para pengikut ajaran klasik kemudian dikoreksi pula oleh Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Jhingan (2000) teori Keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang; sebaliknya, teori ini berkaitan dengan negara kapitalis maju.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana,

yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga

kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial - ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam

masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Perumbuhan Ekonomi Menurut Klasik

Pada era sebelum tahun 1870 para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Namun dalam prakteknya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan masalah

seperti kelebihan produksi, pengangguran dan deflasi. Tokoh-tokoh pertumbuhan Klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus. Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment, perekonomian terdiri dari dua sektor (produsen dan konsumen), tidak ada campur tangan pemerintah dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar.

b. Pandangan Adam Smith

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan *laissez-faire*, dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sadono Sukirno, 2010).

Pandangan David Ricardo

Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi tidak jauh berbeda dengan pendapat Adam Smith yang berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat

proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam buku Sadono Sukirno (2010) yaitu :

1. Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada tahap ini maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja.

2. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja diperkerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah.

3. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sadono Sukirno, 2010). Persamaannya adalah :

$$Y = f(K, L, R, T)$$

Y = tingkat pertumbuhan ekonomi

K = jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan

L = jumlah dan kualitas tenaga kerja yang digunakan

R = jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan

T = tingkat teknologi yang digunakan

3. Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar menuju ke arah yang lebih baik. Para ahli memberikan definisi pembangunan yang berbeda. Siagian dalam Riyadi (2004:4) memberikan pengertian pembangunan sebagai: Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Selanjutnya Siagian (1993) juga mengemukakan pembangunan pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif dan kuantitatif dan mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Selanjutnya terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara pengertian wilayah dan daerah. Pengertian wilayah yang dianut atau dipahami dalam sistem pemerintahan di Indonesia menunjuk pada area

dalam lingkungan suatu negara yang merupakan bagian integral tidak terpisahkan secara administratif dari negara tersebut, karenanya wilayah disebut juga wilayah administratif yang dalam hal ini berarti merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.³ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan pengertian daerah sebagai kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arsyad (1999) menyebutkan pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografis dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini berdasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijakan yang diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lainnya.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Jhingan (2000) perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Perencanaan pembangunan daerah menurut Syahroni (2002:3) adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur yakni dengan merumuskan suatu kegiatan pembangunan daerah yang teratur dari berbagai pelaku, baik itu umum maupun pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk menghadapi saling ketergantungan dan aspek ekonomi, sosial, fisik, lingkungan dan yang lainnya yang saling berkaitan dengan cara:

1. menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara terus menerus
2. merumuskan tujuan – tujuan dan kebijakan - kebijakan pembangunan daerah

3. menyusun konsep strategi – strategi bagi pemecahan masalah (solusi)
4. melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha kegiatan infrastruktur dalam mengembangkan sumber daya ekonomi yang tersedia maupun tidak tersedia, melakukan perbaikan serta pengembangan terhadap sistem struktur yang digunakan terhadap sektor publik dan sektor privat agar lebih berkembang. Ini diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Ada dua masalah didalam kegiatan pembangunan daerah yang menjadi sorotan bagi para ahli ekonomi dan perencanaan daerah, yakni masalah yang terdapat dalam proses pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan.

Sirojuzilam (2007) berpendapat bahwa perbedaan teori pertumbuhan ekonomi daerah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terdapat pada sistem keterbukaan dalam proses input dan output suatu barang atau jasa. Pada skala nasional, sistem daerah input output bersifat terbuka sedangkan pada skala nasional cenderung tertutup.

Menurut Blakely dan Bradshaw (2002:67) ada 4 komponen dalam menyeleksi strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. locality
2. business and economic base
3. human resources
4. community resource

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah meliputi pengembangan pembangunan infrastruktur yang mendukung jaringan struktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan layang, kereta api, pelayaran, bandara, air bersih, listrik, telekomunikasi dan yang lainnya. menciptakan bisnis dan memperluas lapangan kerja guna mengurangi kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar menjadi cerdas, kreatif dan terampil dalam menciptakan dan mengembangkan sesuatu, serta melakukan perbaikan baik itu dalam perbaikan gizi, kesehatan, pendidikan, kemampuan teknologi dan yang lainnya pada masyarakat agar menjadi individu yang sehat dan memiliki keterampilan agar dapat bersaing dalam persaingan kerja. Menurut Archibugi (2008) penerapan teori perencanaan daerah dibagi atas empat komponen yaitu :

1. *Physical Planning* (Perencanaan fisik). Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan daerah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Teori perencanaan ini telah membahas tentang kota dan sub bagian kota secara komprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Bentuk dari perencanaan ini adalah
2. Perencanaan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk *master plan* (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan).
3. Perencanaan Ekonomi Makro yang berkaitan perencanaan ekonomi daerah. Saat ini perencanaan pembangunan ekonomi daerah menggunakan teori yang

digunakan sama dengan teori ekonomi makro yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan investasi. Perencanaan ekonomi makro wilayah adalah dengan membuat kebijakan ekonomi daerah guna merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, tabungan).

4. *Social Planning* (Perencanaan Sosial). Perencanaan sosial membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaan sosial diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis.

5. *Development Planning* (Perencanaan Pembangunan). Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan daerah.

Untuk mencapai suatu pembangunan ekonomi yang komprehensif di suatu Kabupaten maka kegiatan saling melengkapi antar satu sektor dan sektor lainnya antar daerah sangat diperlukan dalam membangun ekonomi yang dituju. Hal ini diperlukan suatu kegiatan perencanaan oleh pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya proses pembangunan transformasi tersebut melalui kebijakan ke arah pembangunan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Konsep pembangunan dipandang perlu disusun serta senantiasa disempurnakan walaupun suatu daerah pada dasarnya berkembang dengan sendirinya walau tanpa suatu perencanaan (Williamson, 1965).

5. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000:146).

Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*).

Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian dalam dua sektor yaitu:

1. Sektor-sektor Basis

Sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

2. Sektor-sektor Bukan Basis

Sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal. Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi.

Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder (*city following*) artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh. Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location

Quotient (LQ), yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut (Tarigan, 2007).

A. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis basis ekonomi yang sering disebut sebagai teori basis ekonomi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi Produk Domestik Regional Bruto dalam menentukan sektor unggulan (basis). Apabila sektor unggulan tersebut dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Arsyad (1999:140-141) menjelaskan bahwa teknik *Location Quotient (LQ)* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

- kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan *industry basic*
- kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini dinamakan industri lokal (*industry non basic*).

Analisis *Location Quotient* dapat menunjukkan besar kecilnya peranan sektor perekonomian di sebuah Kabupaten dengan membandingkan sektor yang sama di tingkat Propinsi. Metode ini digunakan untuk mengetahui sektor unggulan potensial yang dapat dikembangkan di sebuah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil perhitungan *location quotient (LQ)* ini dapat diketahui apabila:

- LQ suatu sektor > 1 dikatakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan
- LQ suatu sektor < 1 dikatakan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.

B. Analisis Tipologi Klassen

Untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat, digunakan alat analisis tipologi per sektor. Adapun kriteria yang digunakan untuk membagi Kabupaten Lampung Barat berdasarkan empat klasifikasi, yaitu: (1) sektor cepat maju dan cepat tumbuh, sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan komoditas lebih tinggi dibandingkan rata rata sektor di Kabupaten Lampung Barat; (2) sektor maju, tetapi tertekan dan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan komoditas yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata – rata sektor di Kabupaten Lampung Barat; (3) sektor berkembang cepat adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi komoditasnya lebih rendah dibandingkan rata rata sektor di Kabupaten Lampung Barat; (4) sektor relatif tertinggal adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan komoditas lebih rendah dibandingkan rata rata sektor di Kabupaten Lampung Barat.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan “tinggi” apabila indikator pada sektor lebih tinggi dibandingkan rata rata seluruh sektor di Kabupaten Lampung Barat dan digolongkan “rendah” jika indikator pada sektor di suatu Kabupaten lebih rendah dibandingkan rata rata sektor di Kabupaten Lampung Barat.

C. Analisis Shift Share

Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian daerah acuan (daerah yang tingkat perekonomiannya lebih tinggi) dalam dua atau lebih kurun waktu.

Analisis ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen :

1. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Keunggulan Shift – Share Analysis:

- a. Digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi
- b. Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan
- c. Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- d. Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja)

Kelemahan Shift – Share Analysis:

- a) Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama
- b) Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

6. Teori Spesialisasi Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan suatu sektor ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kemajuan sektor tersebut (Muzamil, 2001). Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut. Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan,

jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut (Soepono, 1993).

Beberapa ahli ekonomi mulai memperhitungkan efek spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi antar daerah.

Berbagai macam alat analisis telah dikembangkan untuk melihat tingkat spesialisasi regional. Marquillas dalam Soepono (1993) memodifikasi analisis shift share klasik dengan memasukkan efek alokasi untuk melihat spesialisasi suatu sektor dalam suatu wilayah. Selanjutnya Kim dalam Kuncoro (2002) mengembangkan indeks krugman untuk melihat spesialisasi regional di Amerika Serikat

B. Tinjauan Empiris

Berikut merupakan beberapa tinjauan empiris yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

Nama	Judul	Metode penelitian	Kesimpulan
Muhamad Ghuffron (2008)	Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan	Menggunakan - analisis LQ - efek pengganda - analisis <i>Shift Share</i> - analisis SWOT	Terdapat tiga sektor unggulan Kabupaten Lamongan yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran
Mukhlis Adam (2007)	Analisis Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Dasar Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Bima	- Analisis LQ - Analisis MRP - Analisis <i>Shift Share</i> - Analisis <i>Overlay</i> - Analisis Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi	
Dewi Savitri (2008)	Analisis Identifikasi Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Pulau Sumatera	- Analisis <i>Shift Share</i> - Analisis LQ - Definisi Operasional Variabel	Didapatkan sektor unggulan di Pulau Sumatera yaitu sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan
Zulfi Haris (2012)	Analisis Penentuan Sektor dan Subsektor	- Analisis LQ - Analisis Multiplier Sektor Basis - Analisis <i>Shift</i>	Didapatkan sektor unggulan yaitu sektor Industri, sektor

	Ekonomi Unggulan dan Kaitannya dengan Perencanaan Pembagunan Ekonomi di Kabupaten Lampung Utara	<p><i>Share</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis <i>Overlay</i> 	listrik, air bersih, dan gas, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa
Atin susanti (2013)	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Tipologi Klassen - Analisis LQ - Analisis <i>Shift Share</i> - Analisis MRP - Analisis <i>Overlay</i> 	Hasil perhitungan terhadap ketimpangan antar wilayah menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada pada kategori rendah dengan nilai indeks Williamson pada tahun 006-2010 yang berkisar antara 0,20-0,23.